

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1983. *Beberapa Aspek tentang Hukum Agraria*, Penerbit Alumni. Bandung.
- Anke Dwi Saputra. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Yang Akan Datang*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Boedi Harsono. 2009. *Hukum Agraria Indonesia*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Budiman Rusli. 2004. *Pelayanan Publik di Era Reformasi*. www.pikiran-rakyat.com
- Djoko Prakosa dan Budiman Adi Purwanto. 1985. *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- I.B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remadja Rosdakarya. Bandung.
- Inu Kencana Syafiie, Djameluddin Tandjung, Supardan Modeong. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta.
- J. S. Badudu, Suton Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Binacipta. Bandung.
- Nisjar S. Karhi. 1991. Beberapa Catatan tentang Good Governance, Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol 1. Nomor 2,
- Ratminto, Atik Septi Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Modal Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Pamudji S. 1986. *Ekologi Administrasi Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Perangin, Effendi. 1991. *Hukum Agraria Indonesia*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Sampara Lukman. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. STIA LAN Press. Jakarta.
- Sirajuddin Dkk. 2012. *Hukum Pelayanan Publik*. Setara Press. Malang.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Tamin Faisal. 2004. *Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*. Belantika. Jakarta
- Tehupeiory, Aartje. 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penerbit Raih Asa Sukses. Jakarta.
- Thamrin Husni, 2013. *Hukum Pelayanan Publik*. Aswaja Presindo. Yogyakarta.
- Than Thong Kie. 2007. *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.

DASAR HUKUM

- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 Tentang Peranan Tanah Bagi Bangsa Indonesia
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.
Keputusan Presiden RI No. 154 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.